

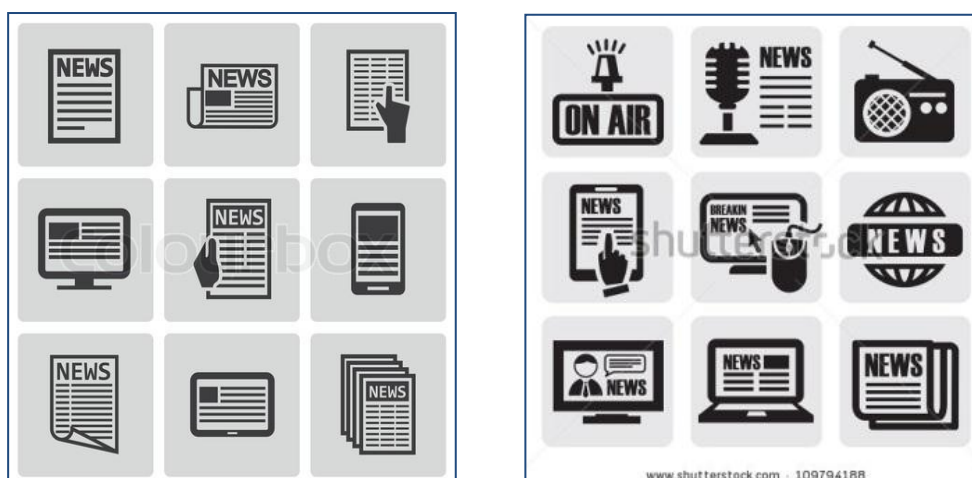


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Sarana & Prasarana

Senin, 13 Oktober 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. G-20 DORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (*Media Online Kompas*)
2. PEMERINTAH PERLU TAMBAHAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR Rp. 85,9 TRILIYUN
(*Media Online Indonesia Finance Today*)

G-20 Dorong Pembangunan Infrastruktur

WASHINGTON DC, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu hal yang terus didorong 20 negara ekonomi terbesar dunia (G-20). Dengan infrastruktur yang semakin baik dan berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dapat terealisasi sesuai rencana.

Infrastruktur tersebut juga merupakan bagian penting dari rencana G-20 untuk menyumbang setidaknya 1,8 persen terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dalam lima tahun mendatang.

Sebagaimana dikemukakan Menteri Keuangan Australia Joe Hockey dalam jumpa pers akhir pekan lalu, sumbangan pertumbuhan ekonomi sebesar itu berarti tambahan 2 triliun dollar AS bagi ekonomi dunia dan jutaan pekerjaan baru.

"Kami menyepakati Global Infrastructure Initiative yang akan berjalan multi-tahun untuk menjaga pertumbuhan kualitas dan kuantitas infrastruktur di negara-negara G-20 ataupun selain G-20," kata Hockey, seperti yang dilaporkan wartawan *Kompas*, **Dewi Idriastuti**, dari Washington DC, Amerika Serikat.

Pekan lalu berlangsung pertemuan menteri keuangan dan



Kami menyepakati Global Infrastructure Initiative, yang akan berjalan multi-tahun untuk menjaga pertumbuhan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

gubernur bank sentral negara-negara anggota G-20 di Washington DC. Pertemuan itu dalam rangkaian acara pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia. Dari Indonesia, Menteri Keuangan M Chatib Basri dan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo hadir.

Mengenai isu infrastruktur yang mengemuka, Chatib mengungkapkan, isu itu sudah disampaikan Indonesia dalam pertemuan G-20 sejak tahun lalu. Bersama Jerman dan Meksiko, Indonesia turut membantu persiapan infrastruktur ini hingga menjadi isu penting yang dibahas

dalam G-20. Bahkan, hal itu akan dibahas dalam pertemuan pemimpin G-20 di Brisbane, Australia, November 2014.

"Isunya bukan sekadar uangnya, tetapi ada sebuah tempat untuk berbagi pengetahuan tentang infrastruktur. Misalnya, mengenai dokumentasi proyek dan persiapan proyek," ungkap Chatib.

Kemitraan

Sebelumnya, Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim menyampaikan terbentuknya kemitraan melalui Global Infrastructure Facility, yang melibatkan berbagai institusi swasta. Kemitraan ini akan menghimpun dana dan mengucurkannya ke negara berkembang dan negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi guna membangun infrastruktur. Diperkirakan, negara-negara tersebut perlu tambahan dana 1 triliun dollar AS per tahun untuk investasi infrastruktur hingga tahun 2020.

Menjawab pertanyaan mengenai inisiatif pendanaan pembangunan infrastruktur yang bermunculan dari berbagai lembaga, Hockey mengatakan, pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral juga membahas hal tersebut.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu hal yang terus didorong 20 negara ekonomi terbesar dunia (G-20). Dengan infrastruktur yang semakin baik dan berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dapat terealisasi sesuai rencana

Hashtag Berita :

#MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia

#PertumbuhanEkonomiNasional #Investasi

#IMF

PEMERINTAH PERLU TAMBAHAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR Rp. 85,9 TRILIYUN



DECIDE NOW

subscribe dan download aplikasi Android & iOS di : www.ift.co.id

Untuk berlangganan koran Indonesia Finance Today hubungi 021-700 95499





INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Senin, 13 Oktober 2014Halaman 7, Kolom 1-5

Pemerintah Perlu Tambahan Anggaran Infrastruktur Rp 85,9 Triliun



Pemerintah perlu menambah anggaran infrastruktur untuk mewujudkan misi dan visi presiden terpilih.

Anggaran Infrastruktur 2009 - 2015

Dalam triliun rupiah

2009	76,3
2010	86
2011	114,2
2012	146,5
2013	184,3
2014	206,6
2015*	150,7

*RAB 2015

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Presiden terpilih menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100% pada 2019

Dusep Malik

JAKARTA - Pemerintah baru dipastikan masih membutuhkan tambahan anggaran infrastruktur sebesar Rp 85,9 triliun tahun depan jika ingin visi misi presiden terpilih terpenuhi. Masih adanya gap anggaran tersebut diketahui setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya menyetujui anggaran infrastruktur

2015 sebesar Rp 150,7 triliun. Anggaran infrastruktur sebesar itu merupakan bagian dari belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp 169 triliun.

Dedy Supriadi Priyanta, Deputy Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan jika melihat visi misi presiden terpilih dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 teknokratik kebutuhan anggaran infrastruktur tahun depan mencapai Rp 236,6 triliun.

Menurut dia, anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 tersebut hanya naik sekitar Rp 6,8

triliun dari Rancangan APBN 2015 sebelumnya yang sebesar Rp 143,9 triliun. Anggaran infrastruktur 2015 tercatat dialokasikan pada 10 Kementerian/Lembaga.

"Memang masih ada gap jika melihat visi misi dari presiden terpilih, terlihat dari yang disetujui tahun depan hanya meningkat Rp 6,8 triliun atau menjadi Rp 150,7 triliun dari RAPBN 2015 sebelumnya sebesar Rp 143,9 triliun," terang Dedy pekan lalu, di kantornya.

Sebelumnya, Dedy mengungkapkan, salah satu isu strategis dalam visi misi presiden terpilih lima tahun ke depan adalah tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 100% pada 2019, sedangkan saat ini rasio

Sementara itu, Bambang PS Brodjonegoro, Wakil Menteri Keuangan II, mengatakan bila berpatokan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menginginkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6%-8% maka anggaran infrastruktur seharusnya minimal 20% dari APBN.

Kebutuhan anggaran infrastruktur 20% dari APBN dinilai sebagai syarat dasar pemerintah jika ingin keluar dari jebakan negara kelas menengah atau *middle income trap*. Selain itu, anggaran infrastruktur tersebut tentu harus mendapatkan dukungan tambahan dari sumber lain seperti swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Korporasi Pemerintah Swasta (KPS).

"Untuk mencapai rasio (anggaran) infrastruktur ideal 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) jelas harus ditambah anggarannya minimal 20% dari budget APBN. Anggaran itu tentu juga belum cukup karena butuh sumber lainnya seperti swasta, BUMN dan KPS," terangnya.

Sedangkan, Josua Pardele, Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), mengatakan agar rasio anggaran infrastruktur mencapai angka ideal 5% terhadap PDB, pemerintah harus berani mengalihkan anggaran subsidi untuk kegiatan infrastruktur, ditambah mendorong peran BUMN, swasta dan pengembangan skema KPS.

Jika melihat struktur belanja saat ini, pemerintah masih menganggarkan subsidi energi cukup besar, sehingga sulit untuk mencapai anggaran infrastruktur ideal. "Jadi kalau mau pertumbuhan ekonomi 6% - 8% anggaran subsidi harus dialihkan ke infrastruktur, dan pemerintah memperbaiki seluruh regulasi pengembang seperti tanah dan perizinan," pungkasnya. ●

Presiden terpilih menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100% pada 2019. Pemerintah Baru dipastikan masih membutuhkan tambahan anggaran infrastruktur, jika visi misi presiden terpilih masih adanya gap anggaran setelah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui anggaran infrastruktur

Hashtag Berita :

#PresidenTerpilih #TransisiPemerintah #PembangunanNasional #APBN2014 #RPJMN2015-2019 #RAPBN2015